

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi mainstream sangat identik dengan angka-angka. Angka adalah pusat dari akuntansi, tanpa angka, akuntansi menjadi suatu hal yang mustahil dan tanpa angka kita tidak dapat menggambarkan dan melaporkan keadaan suatu organisasi (Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syariah, 2000).

Ilmu akuntansi sudah ada sejak masa Rasulullah SAW yang ditandai dengan turunnya Surat Al-Baqarah Ayat 282. Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pencatatan dan akuntansi. Ada banyak hal dalam Islam yang berhubungan dengan pencatatan, perhitungan dan akuntansi, utang dan zakat. Dari situlah dapat disimpulkan bahwa dalam Islam telah diperintahkan untuk melakukan pencatatan yang bertujuan untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara dua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*.

Akuntansi adalah bagian dari kejadian sosial, ekonomi, dan politik, namun ada pendekatan lain yang melihat bahwa akuntansi dapat membentuk lingkungannya dengan interaksi sosial (*socially constructing*). Ini membuktikan bahwa akuntansi bukanlah suatu bentuk ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas nilai (*value free*), tetapi sebaliknya ia adalah disiplin dan praktik yang sangat sarat dengan nilai. Capra (1997, 255-6) menyatakan tidak ada yang disebut dengan ilmu sosial (akuntansi) yang bebas nilai, ilmuwan

sosial (peneliti akuntansi) yang menganggap pertanyaan tentang nilai-nilai sebagai sesuatu yang “non-ilmiah” dan berpendapat bahwa mereka akan menghindarinya berarti melakukan suatu yang tidak mungkin.

Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepada laba dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba adalah organisasi yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Meski demikian *not-for-profit* juga harus diartikan sebagai *not-for-loss*. Maka dari itu, organisasi nirlaba seharusnya tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi nirlaba memperoleh surplus maka surplus tersebut akan dikembalikan kembali untuk kepentingan publik.

Banyaknya kasus bahwa pengelola musholla tidak amanah dalam pengelolaan keuangan, untuk itu organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan. Hal ini bagi sebagian organisasi nirlaba yang lingkungannya masih kecil serta sumber dayanya masih belum memadai, mungkin akan menjadi hal yang menantang untuk dilakukan. Terlebih karena organisasi nirlaba jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang mengurus administrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan karena organisasi nirlaba tidak boleh hanya mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya (Fatih, 2015). Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba (Mangkona, 2015).

Permasalahan lain yang seringkali muncul yaitu masih banyaknya musholla yang tidak mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas, biasanya hanya dicatat sebatas penerimaan dan pengeluaran kas tanpa merinci sumber pemasukan kas dan penggunaan kas musholla untuk apa saja, sehingga terkadang hal ini menimbulkan kecurigaan dikalangan masyarakat. Pencatatan keuangan masjid biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid saja tanpa memperlihatkan jumlah aset yang dimiliki oleh masjid dan berapa nilainya, sehingga banyak kasus hilangnya aset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan (Andarsari, 2016).

Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2011 membuat pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 45) untuk organisasi nirlaba sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan agar laporan keuangan yang disajikan mudah dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, Musholla yang merupakan organisasi nirlaba diharapkan menyajikan laporan keuangannya dengan berpedoman pada PSAK No 45. Karakteristik organisasi nirlaba atau dalam hal ini, organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi sektor publik memperoleh sumber daya dari lembaga donatur dan para penyumbang lainnya. Pengawasan pengelolaan musholla dilakukan oleh Pengurus musholla. Pengurus musholla bertugas menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti

dalam hal fasilitas musholla yaitu peralatan yang dibutuhkan musholla secara rutin, aktivitas apa saja yang harus dilaksanakan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya musholla untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam penerapan akuntansi musholla, musholla menggunakan basis kas yaitu mengakui biaya dan pendapatan pada saat pembayaran, dan musholla tidak perlu membuat jurnal cukup dengan pembukuan yang dicatat dengan tunggal (*single entry method*). Menurut PSAK No. 45, organisasi nirlaba perlu setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

Contoh Penyajian Laporan Posisi Keuangan menurut PSAK No. 45 pada Musholla sebagai berikut:

Tabel 2.1

Musholla
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2xxx

Aset:		
Kas dan Setara Kas	<u>Rp xxx</u>	
Jumlah Aset		Rp xxx
Kewajiban dan Aset Bersih		
Kewajiban		-
Aset Bersih Tidak Terikat		Rp xxx
Aset Bersih Terikat Temporer (catatan B)	<u>Rp xxx</u>	
Jumlah Kewajiban dan Aset		Rp xxx

2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Contoh Penyajian Laporan Aktivitas menurut PSAK No. 45 pada Musholla sebagai berikut:

Tabel 2.2

Musholla
Laporan Aktivitas
31 Desember 2xxx

Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat		
Sumbangan	Rp xxx	
Jasa Layanan	Rp -	
Penghasilan dari Investasi	Rp -	
Lain-lain	<u>Rp -</u>	
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat	Rp xxx	
Aset Bersih yang Dibebaskan dari Pembatasan:		
Pemenuhan Program Pembatasan	Rp xxx	
Jumlah Aset yang berakhir pembatasannya	<u>Rp xxx</u>	
Jumlah Pendapatan, Penghasilan dan Sumbangan Lain		Rp xxx
Beban dan Pengeluaran:		
Kontribusi Kegiatan Islam	Rp xxx	
Honorarium	Rp xxx	
Kontribusi Perbaikan Musholla	Rp xxx	
Biaya Umum	<u>Rp xxx</u>	
Jumlah Beban		<u>(Rp xxx)</u>
Kenaikan Jumlah Aset Bersih Tidak Terikat		Rp xxx
Pemenuhan Program Pembatasan:		
Sumbangan	Rp xxx	
Aset Bersih Terbebaskan dari Pembatasan	<u>(Rp xxx)</u>	
Kenaikan Jumlah Aset Bersih Terikat		<u>(Rp xxx)</u>
Kenaikan Aset Bersih		Rp xxx
Aset Bersih pada Awal Tahun		<u>Rp xxx</u>
Aset Bersih pada Akhir Tahun		Rp xxx

3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Contoh Penyajian Laporan Arus Kas menurut PSAK No. 45 pada

Musholla sebagai berikut:

Tabel 2.3

Musholla
Laporan Arus Kas
31 Desember 2xxx

Aliran kas dari Aktivitas Operasi:		
Kas dari pendapatan jasa	Rp -	
Kas dari penyumbang	Rp xxx	
Penerimaan lain-lain	Rp -	
Honorarium	(Rp xxx)	
Kontribusi perbaikan musholla	(Rp xxx)	
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi		(Rp xxx)
Aliran kas dari aktivitas investasi:		
Penerimaan dari investasi	Rp -	
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi		Rp -
Aliran kas dari pendanaan		
Penerimaan dari kontribusi terbatas dari:		
Pemerintah	Rp xxx	
Donator	Rp xxx	
Aktivitas pendanaan lain:		
Kegiatan Islam	(Rp xxx)	
Biaya umum	(Rp xxx)	
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan		<u>Rp xxx</u>
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas		Rp xxx
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun		<u>Rp xxx</u>
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun		Rp xxx

3. Catatan atas laporan keuangan. Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tidak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan. PSAK No. 45 mengelompokkan sumber daya organisasi nirlaba dalam 4 kategori yang masing-masing tergantung pada pembatasan:

- a. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
- b. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- c. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- d. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

2.1.2 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

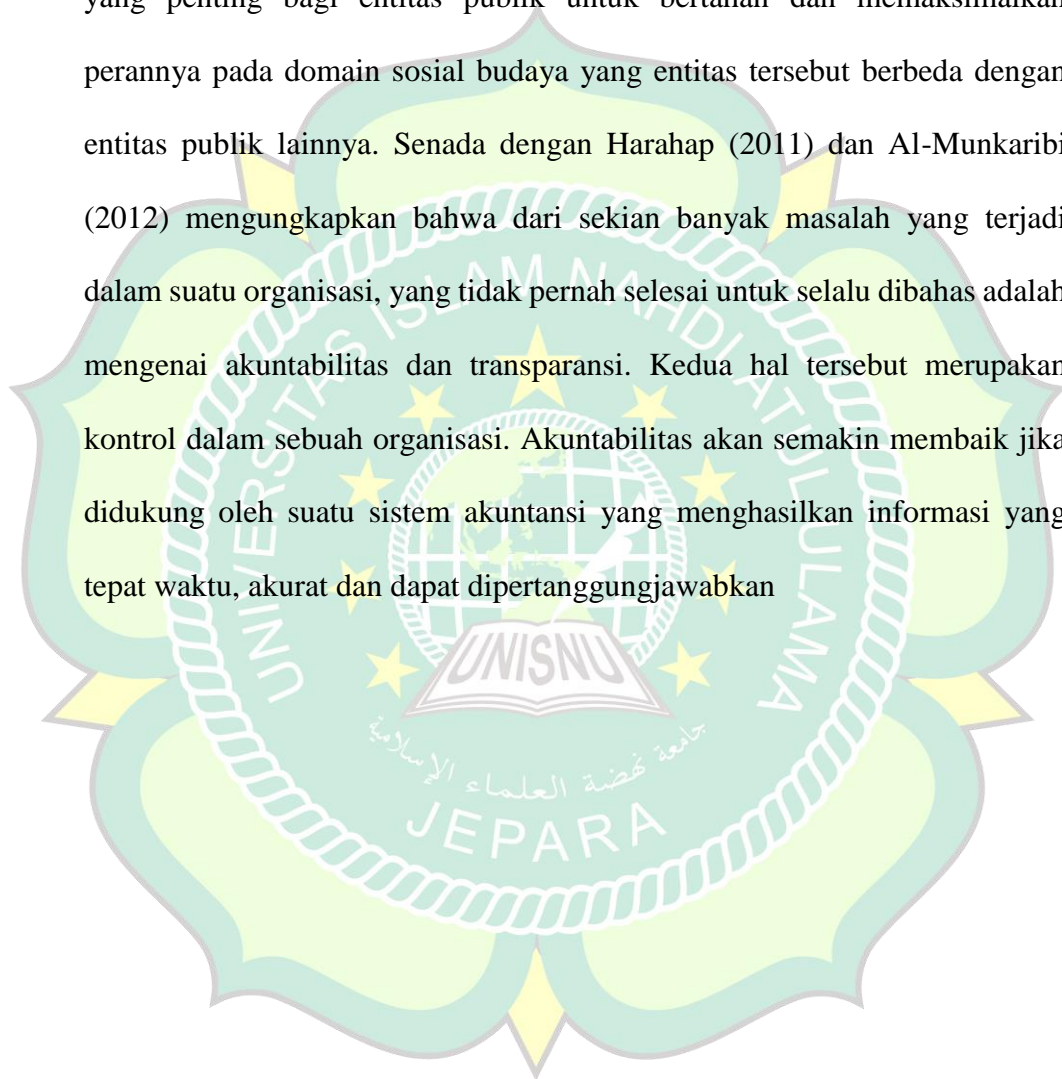
tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (Mardiasmo, 2009). Tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan (Sochimim, 2015).

Praktik akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas di entitas keagamaan khususnya Islam melalui Musholla masih jarang menjadi perhatian khusus dalam praktik dan kajian ilmiah. Padahal dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik Musholla, perlu untuk melakukan pembenahan administrasi termasuk publikasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Musholla adalah *Baitullah* (rumah Allah) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk tempat ibadah serta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Musholla merupakan entitas publik sebagai tempat nilai-nilai spiritual Islam dikembangkan dan nilai-nilai spiritual tersebut seringkali tidak dapat berdamai dengan nilai-nilai materialisme lainnya yang biasa eksis pada entitas pelaporan akuntansi lainnya. Booth (1993) dalam Simanjuntak dan Januarsi (2011) menjelaskan bahwa, pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh

pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan, hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, akuntansi pada dasarnya adalah *tools* yang dapat mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan. Islam melalui Al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang diikuti oleh para pembuat laporan akuntansi menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*.

Akuntansi syariah pada intinya yaitu akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandang Islam (Muhammad, 2002). Prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pencatatan transaksi dalam pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh dan ditujukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi (Muhammad, 2002). Menurut Triyuwono yang dikutip oleh Permatasari dan Dewi (2011) menyatakan bahwa ruang lingkup akuntabilitas dalam akuntansi Islam antara lain meliputi akuntabilitas kepada Tuhan, akuntabilitas kepada manusia dan akuntabilitas kepada alam. Pertanggungjawaban mengarah pada semua pengurus kerena bagaimanapun mereka adalah satu kesatuan organisasi yang harus bekerja sama dalam menjalankan semua kegiatan termasuk di dalamnya yaitu pengelolaan keuangan musholla. Namun, bendahara tetap memiliki tugas yang lebih dalam pengelolaan tersebut dan harus memberikan laporan keuangan kepada pengurus lain yang kemudian disampaikan dihadapan jama'ah setelah sholat

jum'at dilaksanakan dan juga ditempel pada papan pengumuman masjid (Latif, 2014). Salah satu konsep dasar akuntansi Islam yaitu penekanan pada *accountability* (pertanggungjawaban), kejujuran, kebenaran dan keadilan (Harahap, 2011). Maka transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya yang entitas tersebut berbeda dengan entitas publik lainnya. Senada dengan Harahap (2011) dan Al-Munkaribi (2012) mengungkapkan bahwa dari sekian banyak masalah yang terjadi dalam suatu organisasi, yang tidak pernah selesai untuk selalu dibahas adalah mengenai akuntabilitas dan transparansi. Kedua hal tersebut merupakan kontrol dalam sebuah organisasi. Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan



2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

Penulis & Tahun	Judul	Objek	Hasil
Dahnil Anzar Simanjuntak dan Yeni Januarsi, 2011	Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid	Masjid Raya Baitusalam, Jl. Raya Tanjung Kait Desa Ketapang, Mauk Kabupaten Tangerang	<p>1. Dalam Konteks konstruksi budaya Masjid Baitusalam, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban.</p> <p>2. Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik.</p> <p>3. Clash Jurisdictional tidak terjadi pada kasus Masjid Baitusalam, justru ustadz, agamawan yang mengelola masjid mendorong dan menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk mendisain penggunaan akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan masjid agar dapat membantu perbaikan kinerja masjid dalam melakukan peran-peran dakwah dan pembangunan konstruksi sosial ditengah masyarakat Islam. Namun, persepsi individu akuntan yang berpikir sebagai akuntan mainstream yang kebanyakan yang tertarik mengembangkan diri dan akuntansi pada domain entitas mainstream yakni entitas komersial menjadi barrier pengembangan akuntansi pada entitas akuntansi yakni masjid.</p>

Abdul Latif, 2014	Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (Studi Kasus di Masjid Nurul Huda Kecamatan Polanharjo)	Masjid Nurul Huda Kecamatan Polanharjo	Berdasarkan hasil data yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa pengurus Masjid sudah menerapkan praktek akuntansi, walaupun masih menggunakan metode yang sederhana. Pengelolaan keuangan dicatat dengan baik walaupun masih sederhana, tetapi metode tersebut berlangsung bertahun-tahun dengan baik.
Nurjannah, 2018	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid : PSAK NO. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf)	Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus masjid telah mengelola keuangan dengan terbuka sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan masjid dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengelolaan keuangan dicatat dengan baik walaupun masih sederhana. Terkait PSAK 45, pengurus masjid belum melakukan pencatatan berdasarkan PSAK 45 dikarenakan standar tersebut diakui belum pernah didengar dan diperkenalkan pada pengurus masjid.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

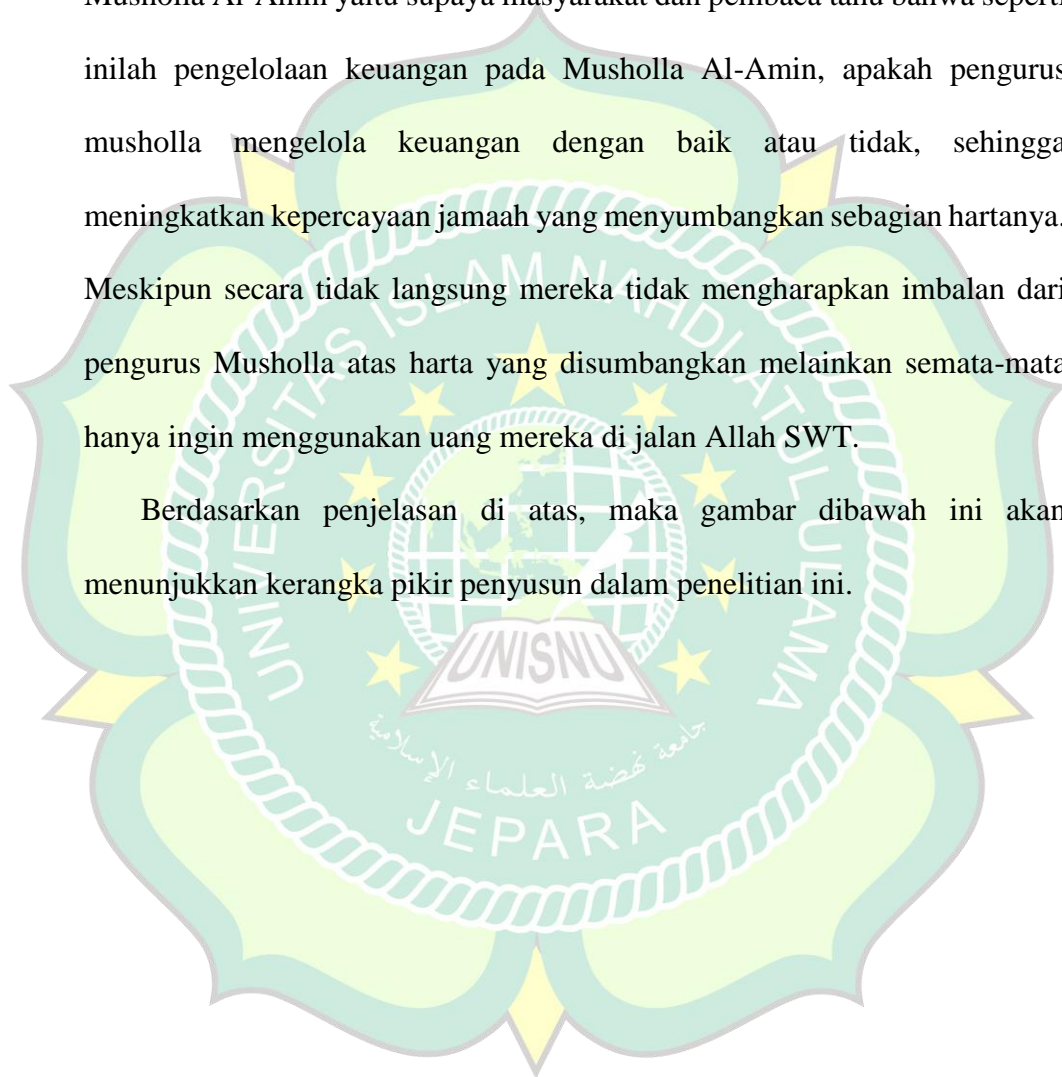
Praktik akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas khususnya Islam melalui musholla masih jarang menjadi perhatian, padahal praktik pengelolaan keuangan musholla sangatlah penting sebagai penerapan prinsip akuntabilitas pada masyarakat. Mengingat masyarakat/jamaah musholla termasuk donatur saat ini sudah pintar membaca keadaan musholla, sehingga untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat terhadap terjadinya praktik kecurangan atau tidak amanahnya pengurus musholla dalam penelitian ini bendahara musholla, ketua musholla dan pengurus lainnya, maka perlu dilakukan pencatatan laporan keluar masuknya kas. Pengurus musholla harus mencatat sumber penerimaan kas dan penggunaan kas musholla untuk apa saja sehingga keuangan musholla lebih terkontrol dan transparan dalam pengelolaannya.

Musholla Al-Amin Merupakan musholla yang terlelak di salah satu desa di Kabupaten Jepara. Musholla ini dijadikan sebagai tempat peribadatan umat Islam. Musholla ini setiap minggunya ada pemasukan kas yang walaupun jumlahnya tidak seberapa, tetapi musholla sebagai entitas publik wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut. Dengan demikian dapat disusun simpulkan bahwa arus keluar masuk kas pada musholla ini lancar.

Dapat dilihat bagaimana terlaksananya praktik akuntabilitas pengurus musholla dalam mengelola keuangan Musholla Al-Amin. Dalam menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba dalam penelitian ini musholla, IAI mengeluarkan standar pelaporan keuangan yakni PSAK No. 45. Dengan

adanya konsep akuntabilitas dan standar ini diharapkan pengurus musholla mampu menghasilkan tata kelola keuangan musholla dengan baik dan transparan dengan membuat laporan keuangan dan mengumumkannya di hadapan jamaah. Sehingga implikasi dilakukannya penelitian ini untuk Musholla Al-Amin yaitu supaya masyarakat dan pembaca tahu bahwa seperti inilah pengelolaan keuangan pada Musholla Al-Amin, apakah pengurus musholla mengelola keuangan dengan baik atau tidak, sehingga meningkatkan kepercayaan jamaah yang menyumbangkan sebagian hartanya. Meskipun secara tidak langsung mereka tidak mengharapkan imbalan dari pengurus Musholla atas harta yang disumbangkan melainkan semata-mata hanya ingin menggunakan uang mereka di jalan Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka gambar dibawah ini akan menunjukkan kerangka pikir penyusun dalam penelitian ini.



Gambar 2.1

Kerangka Pikir

